

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi suatu rangkaian strategi dan praktik yang dibentuk oleh suatu organisasi untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya. Sistem pengendalian internal merupakan proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian- kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan (*American Accounting Association* dalam Sawyers, 2005:9).

Internal Control is a process, effected by the entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance". Maksudnya proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain, entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan (COSO, 2015: 6). Pengendalian internal diarahkan untuk pencapaian, proses yang terdiri dari tugas dan aktivitas yang sedang berlangsung, dipengaruhi oleh orang yang tidak hanya tentang kebijakan dan prosedur manual sistem, mampu

memberikan jaminan yang wajar dan dapat disesuaikan dengan struktur entitas yang pantas (Urton L. Anderson dan Michel J. Head, 2018:6.7).

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku (Karlina dan Sitti, 2021:27). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:129).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan sistem pengendalian internal adalah pengendalian terhadap proses operasional organisasi, berupa kebijakan dan tindakan yang melibatkan suatu pihak dalam organisasi untuk mengatur serta memberikan arah dalam aktivitas organisasi, yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam operasional organisasi. Tujuan adanya pengendalian internal sebagai berikut (Mulyadi, 2016:129).

1) Menjaga Aset Organisasi

Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset organisasi dari potensi risiko seperti pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini

melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur keamanan fisik dan logis untuk memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan operasional organisasi.

2) Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

Pengendalian internal mencakup langkah-langkah untuk memastikan ketelitian dan keandalan data akuntansi. Ini termasuk penerapan kontrol internal seperti rekonsiliasi berkala, validasi transaksi, dan pemantauan terhadap potensi kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan keuangan.

3) Mendorong Efisiensi

Pengendalian internal dirancang untuk mendorong efisiensi operasional. Ini mencakup penyusunan prosedur operasional yang efektif, alokasi sumber daya yang optimal, dan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang paling efisien.

4) Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Pengendalian internal memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Hal ini melibatkan penerapan kontrol seperti pemisahan tugas dan audit internal untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan pengendalian internal lainnya sebagai berikut;

(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 2013 dan Urton Anderson dan Michel J. Head, 2018:6.8-9) pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan operasi

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui, ataupun kebijakan- kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap dan peraturan dengan entitas merupakan subjeknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal bertujuan menjaga aset organisasi, memastikan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selain itu, tujuan pengendalian internal mencakup efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pengendalian internal berperan penting dalam mendukung kelangsungan, integritas, dan pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal walaupun merupakan suatu mekanisme yang esensial untuk menjaga keberlanjutan dan integritas organisasi, namun tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Terdapat lima keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal antara lain sebagai berikut (Mulyadi, 2016:131; Sensia & Salomo, 2019: 87 dan Damayanti, 2020: 97).

1) Kesalahan dalam pertimbangan

Pihak manajemen dan personil lainnya dapat melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam pelaksanaan tugasnya dikarenakan adanya informasi yang tidak memadai, terbatas waktu, atau tekanan lainnya.

2) Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan bisa terjadi karena personil salah dalam memahami perintah atau membuat kesalahan lainnya karena adanya kelalaian, kelelahan, atau tidak adanya perhatian. Perubahan yang bersifat permanen atau sementara dalam personil, sistem dan prosedur juga mampu menimbulkan adanya gangguan.

3) Kolusi

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa personil dengan tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat menimbulkan kebobolan pengendalian internal terhadap kekayaan aset entitas dan tidak terungkapnya apabila terjadi penyimpangan atau kecurangan oleh pengendalian internal yang telah dirancang.

4) Pengabaian oleh Manajemen

Manajemen dapat mengabaikan prosedur ataupun kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang tidak sah seperti peraturan semu, keuntungan pribadi manajer, penyajian laporan keuangan yang berlebihan.

5) Biaya Lawan Manfaat

Biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak melebihi dari manfaat yang dihasilkan pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat terhadap biaya maupun manfaat tidak mungkin dilakukan, sehingga manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengendalian internal

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal masih memiliki keterbatasan-keterbatasan utama yang melekat pada pengendalian internal, yaitu kesalahan dalam pertimbangan, potensi gangguan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kelalaian atau perubahan dalam personil, risiko kolusi yang dapat merugikan kekayaan entitas, pengabaian oleh manajemen terhadap prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta perluasan biaya yang mungkin tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan oleh pengendalian internal.

2.1.1.4 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi pemerintahan yang efektif harus memenuhi lima pengukuran utama yang saling berkaitan, lima indikator pengendalian internal sebagai tersebut (COSO, 2015 dan Nurnaluri, 2019: 385-386).

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Seperangkat standart, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal. Pimpinan direksi dan manajemen menetapkan kebijakan secara

jelas terkait pentingnya pengendalian internal dan perilaku standart. Lingkungan pengendalian adalah sikap dan tindakan pimpinan dan manajemen menjadi fondasi terhadap komponen pengendalian intern lainnya.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Proses yang dinamis dan berulang untuk menilai dan mengidentifikasi adanya risiko dalam pencapaian tujuan entitas, serta menentukan bagaimana cara melakukan pengelolaan risiko. Dalam hal ini penilaian risiko tidak hanya terbatas dalam risiko pelaporan laporan keuangan yang tidak handal, tetapi juga untuk mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi dalam lingkungan eksternal maupun internal.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Tindakan yang diatur oleh kebijakan dan prosedur untuk mengurangi adanya risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Pengendalian dilakukan disemua tingkat dan berbagai tahap dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan. Contoh aktivitas pengendalian yaitu, otorisasi, rekonsiliasi, review, pemisahan tugas dan tanggung jawab.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan berulang kali dan terus menerus untuk menyediakan dan berbagi informasi yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengendalian internal.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Kegiatan untuk memastikan bahwa kelima komponen pengendalian internal sudah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dan kekurangan sesegera mungkin dikomunikasikan dengan dewan direksi.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian internal sebagai berikut (Mulyadi, 2016: 130).

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara tegas.
- 2) Sistem otorisasi dan prosedur, pencatatan harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- 3) Praktik yang sehat untuk terlaksananya pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan.
- 4) Mutu karyawan jadi unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting karena jika karyawan kompeten dan jujur akan menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Berdasarkan indikator pengendalian internal yang dijelaskan, maka dalam penelitian ini menerapkan indikator yang diusulkan oleh (COSO dan Nurnaluri, 2019:385-386) sebagai alat ukur sistem pengendalian internal (SPI) di desa berkembang memiliki alasan yang sangat relevan dan penting. Pertama, lingkungan pengendalian memberikan dasar yang kokoh untuk SPI dengan menetapkan

standar, proses, dan struktur yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas operasional desa.

2.1.2 Implementasi *Good Government Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Government Governance*

Good Government Governance (GGG) menjadi suatu konsep dan landasan filosofis dan praktis yang memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai prinsip inti dalam tata kelola yang baik, *good government governance* tidak hanya menciptakan kepercayaan publik, tetapi juga membentuk pondasi yang kuat untuk keberlanjutan, integritas, dan kesejahteraan masyarakat. *Good governance is a the excercis of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all level.* Artinya bahwa *good governance* adalah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa di semua tingkat (UNDP dalam Mardiasmo, 2018: 31). *Good governance the way state power is used in managing economic and social resources for development of society* maksudnya sebagai upaya pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat (Word bank dalam Mardiasmo, 2018: 31).

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya kreativitas

usaha (Mardiasmo, 2018: 32). *Good government governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban dan bersikap akuntabel terhadap publik dengan cara yang profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya termasuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja pemerintah (Nofianti, 2015: 52). *Good government governance* bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam suatu organisasi merupakan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya, dan juga memiliki kemampuan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djalil, 2014: 395),

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good government governance* adalah tata kelola yang diterapkan untuk semua kegiatan publik agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip dan nilai tertentu.

2.1.2.2 Faktor Pendukung *Good Government Governance*

Good government governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pemerintah, untuk mendukung terciptanya *good governance* perlu dilakukan serangkaian reformasi sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:45).

- 1) Reformasi sistem pembiayaan, meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah;
- 2) Reformasi sistem penganggaran, meliputi perubahan struktur anggaran;

- 3) Reformasi sistem akuntansi, melalui upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah serta perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik;
- 4) Reformasi sistem pemeriksaan, melalui optimalisasi peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawal pembangunan di daerah; dan
- 5) Reformasi sistem manajemen keuangan Daerah, melalui pendayagunaan potensi sumber daya secara optimal.

Faktor lain dalam pelaksanaan tugas pencapaian *good governance* yang baik sebagai berikut (Yuanida dalam Ikhwalidi, 2023: 334 dan Hidayat, 2023:130).

- 1) Faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan *good governance*, yaitu: Faktor manusia, berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah yang terdiri dari unsur pimpinan dan para pegawai;
- 2) Faktor partisipasi masyarakat, salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *good governance* adalah sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Faktor keuangan daerah adalah faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah membutuhkan dana;
- 4) Faktor peralatan penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*; dan
- 5) Faktor organisasi dan manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen.

Agar penciptaan *good governance* dapat terwujud, maka diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik pula.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good government governance* memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Upaya untuk mencapai hal tersebut, perlu serangkaian reformasi yang melibatkan perubahan dalam sistem pembiayaan, penganggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan manajemen keuangan daerah. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi sumber daya. Selain itu, faktor-faktor seperti kualitas manusia, partisipasi masyarakat, keuangan daerah, peralatan, organisasi, dan manajemen juga turut mempengaruhi pelaksanaan *good governance*. Oleh karena itu, keberhasilan *good governance* tidak hanya tergantung pada aspek kebijakan dan sistem, tetapi juga melibatkan faktor manusiawi, partisipasi masyarakat, keuangan, peralatan, serta organisasi dan manajemen yang efektif.

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*

Terdapat prinsip dan nilai yang diterapkan mengenai tata kelola yang baik terkait pelaksanaan urusan pemerintahan. Prinsip-prinsip *Good governance* menjadi karakteristik dari *good government governance* yaitu (Wibowo dkk, 2014: 55 dan Hendrayady, *et al*, 2022: 6-8).

- 1) Partisipatif, merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintahan partisipatif memberikan peluang kepada warga untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan program yang memengaruhi mereka;

- 2) **Kepastian Hukum**, menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menciptakan lingkungan di mana hak dan kewajiban semua pihak diakui dan dihormati, memberikan dasar yang kuat untuk keadilan dan ketertiban;
- 3) **Transparansi**, merujuk pada keterbukaan dan keterangkasan dalam kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Transparansi menciptakan keyakinan masyarakat dan memungkinkan pemantauan publik terhadap kegiatan pemerintah;
- 4) *Responsiveness/Responsivitas*, menggambarkan kemampuan pemerintah untuk merespons dan mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cepat dan efektif. Responsivitas menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat;
- 5) *Consensus Orientation/Orientasi pada Konsensus*, menunjukkan pentingnya mencapai kesepakatan dan keselarasan di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Pemerintahan dengan orientasi konsensus berusaha untuk membangun kesepahaman bersama dalam pengambilan keputusan;
- 6) *Equity*, menekankan pada pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural. Prinsip ini mendukung terciptanya keadilan sosial;
- 7) *Effectiveness and Efficiency/Efektivitas dan Efisiensi*, merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan dengan hasil yang optimal dan menggunakan sumber daya secara efisien. Efektivitas berkaitan

dengan pencapaian tujuan, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang minimal;

- 8) *Accountability*/Akuntabilitas, menekankan pada tanggung jawab pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas kebijakan, keputusan, dan tindakan mereka. Akuntabilitas menciptakan dasar untuk transparansi dan kepercayaan publik; dan
- 9) Profesionalisme, Mengacu pada kualitas dan integritas kerja pemerintah. Pemerintahan yang profesional diidentifikasi dengan pegawai yang kompeten, beretika tinggi, dan melibatkan diri dalam pelayanan publik dengan dedikasi tinggi.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut (*Council of Europ* dalam Mardiasmo, 2018: 34-40).

- 1) Perilaku pemilihan umum, representasi, dan partisipasi yang adil, menekankan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, representasi yang merata dalam struktur pemerintahan, dan partisipasi aktif warga dalam proses politik;
- 2) Responsif, merujuk pada kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan efektif;
- 3) Efisien dan Efektif, menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang efisien, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan mencapai tujuan dengan hasil yang optimal;

- 4) Keterbukaan dan Transparansi, menekankan pada pentingnya menginformasikan publik secara terbuka dan transparan mengenai kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah;
- 5) Peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa pemerintah beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan;
- 6) Etika perilaku, menunjukkan pentingnya perilaku pemerintah yang sesuai dengan standar etika tinggi, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab;
- 7) Kompensasi dan kapasitas, mengacu pada sistem kompensasi yang adil dan sesuai, serta kapasitas pemerintah yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya;
- 8) Inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan, menekankan pada kemampuan pemerintah untuk berinovasi dan menerima perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
- 9) Keberlanjutan dan orientasi jangka Panjang, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi dan rencana jangka panjang yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Pengelolaan keuangan yang sehat, menyatakan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati dan transparan untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah;
- 11) Hak asasi manusia, keaneka ragaman budaya, dan kohesi sosial, merujuk pada perlindungan hak asasi manusia, menghargai keaneka ragaman

budaya, dan mempromosikan kohesi sosial dalam kebijakan dan tindakan pemerintah; dan

- 12) Akuntabilitas, menekankan pada tanggung jawab pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, dan tindakannya kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup partisipatif, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme, menjadi landasan karakteristik *good government governance*. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat, pengakuan hak dan kewajiban, serta efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah.

2.1.2.4 Indikator-indikator *Good Government Governance*

Good government governance merupakan kerangka kerja yang memandu pelaksanaan pemerintahan yang baik. Indikator *good government governance* menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan esensial *good governance*. Adapun untuk mengukur *good government governance* menggunakan indikator sebagai berikut.

- 1) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menuntut bahwa lembaga harus menyajikan informasi yang bersifat material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk menjaga obyektivitas dalam pengelolaan suatu

pemerintahan (Mahsun, 2018: 48; Sedarmayanti, 2014: 5 dan Mardiasmo, 2018: 165).

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa suatu entitas, baik itu perusahaan atau pemerintahan, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, pemerintahan harus dikelola dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tanggung jawab atas setiap tindakan dapat diukur dan dievaluasi (Mahsun, 2018: 48; Sedarmayanti, 2014: 5 dan Mardiasmo, 2018: 165).

3) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi merujuk pada keterlibatan individu dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi mereka. Konsep partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif, memberikan suara kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan (Mahsun, 2018: 48; Sedarmayanti, 2014: 5 dan Mardiasmo, 2018: 165).

4) Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas melibatkan proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin (Sedarmayanti, 2014: 5 dan Mardiasmo, 2018: 165).

5) Penegakan hukum (*law enforcement*)

Penegakan hukum menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan tanpa merugikan negara (Sedarmayanti, 2014: 5 dan Mardiasmo, 2018: 165).

Selanjutnya Indikator lain *good government governace* menurut OECD dalam Kusmayadi dkk (33-42:2015) diantaranya:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Bahwa pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (*reliable*) dan berkualitas.

2) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Bahwa pengelola untuk memberikan pertanggung-jawaban atas semua tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan.

3) Keterbukaan (*Transparancy*)

Bahwa pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.

4) Kewajaran (*Fairness*)

pengelola memperlakukan pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, dan pemodal) maupun sekunder (pemerintah, masyarakat, dan pihak lain).

5) Kemandirian (*Independency*)

Bahwa pengelola dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur *good government governace* menggunakan indikator dari OECD yaitu akuntabel, responsibel, partisipasi, kewajaran dan kemandirian. Hal ini karena dengan menggunakan indikator *good government governace* tersebut di Pemerintah Desa menjadi lebih terukur dan dapat membentuk dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good government governance* yang mengutamakan tata kelola yang baik, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Kompetensi Pegawai

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai khususnya dalam bidang keuangan, merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan oleh individu yang terlibat langsung dengan keuangan suatu organisasi. Hal ini mencakup sejumlah aspek yang mencakup pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan keuangan, dan

penyusunan laporan keuangan organisasi. *In effective financial management, the government must have competent human resources. Competent resources are indicated by educational background in accounting, frequent participation in education and training, and work experience in the financial field.* Artinya bahwa dalam pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya yang kompeten ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan (Gomes dalam Fauzan, 2020: 9). *Competent resources that truly understand financial accounting, supported by an educational background in accounting, experience in the financial field, and a high frequency of education and training.* Artinya bahwa pegawai yang berkompoten dan benar-benar memahami akuntansi keuangan, yang didukung dengan latar belakang pendidikan bidang akuntansi, pengalaman di bidang keuangan, dan frekuensi pendidikan serta pelatihan yang tinggi (Budiasih dalam Nugroho, 2020:31).

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A Tahun 2003 menetapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap (perilaku) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini memungkinkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi pegawai merupakan Kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman (Dunnets dalam Atiningsih, et al, 2019: 16). Kompetensi

pegawai mencerminkan seberapa baik pegawai dalam melaksanakan kegiatan spesifik seperti mengoperasikan peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis (Blanchard & Thacker dalam Atiningsih, et al, 2019: 16).

Individual competency describes a specific set of behaviors or performance indicators associated with a facet of exceptional performance in an organizational role. Artinya bahwa kompetensi individu menggambarkan seperangkat perilaku atau indikator kinerja tertentu yang terkait dengan aspek kinerja luar biasa dalam peran organisasi (Bruce Griffiths, 2015:4). Pengertian terakhir, *a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/ or superior performance in a job or situation.* Bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar dari seorang individu yang secara kausal terkait dengan referensi kriteria yang efektif dan / kinerja yang unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi (Spencer dan Spencer, 1993:9).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang keuangan untuk mencapai manajemen keuangan yang efektif. Sumber daya manusia yang kompeten, dengan latar belakang pendidikan yang solid, aktif dalam pendidikan dan pelatihan, serta berpengalaman di bidang keuangan, menjadi kunci untuk menjalankan tugas keuangan pemerintahan secara profesional.

2.1.3.2 Faktor yang Memengaruhi Kompetensi Pegawai

Aparatur desa dalam mengelola keuangan desa penting memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan

keuangan tersebut secara optimal. Beberapa faktor memengaruhi kompetensi pegawai sebagai berikut.

- 1) Pendidikan dan Pelatihan, pendidikan formal di bidang yang relevan, serta pelatihan berkala, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan dana desa (Rahmawati, 2020: 7).
- 2) Pengalaman Kerja, Pengalaman praktis dalam mengelola dana desa dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan meningkatkan keahlian pegawai (Widiasih, 2021: 6).
- 3) Kepemimpinan dan Manajemen, kepemimpinan yang efektif dan keterampilan manajemen yang baik dapat membantu pegawai dalam mengambil keputusan strategis dan efisien dalam pengelolaan dana desa (Umar & Tawakkal, 2023: 15).
- 4) Kepatuhan terhadap Peraturan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel (Marlina & Rahmayanti, 2021: 22).
- 5) Etika dan Integritas, sikap etis dan integritas yang tinggi dari pegawai menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Statements, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pendidikan dan pelatihan yang relevan membuka peluang peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai, sementara pengalaman kerja praktis memberikan wawasan mendalam dan meningkatkan keahlian. Kepemimpinan efektif dan

keterampilan manajemen yang baik mendukung pengambilan keputusan strategis dan efisien dalam pengelolaan dana desa. Kepatuhan terhadap peraturan menciptakan lingkungan transparan dan akuntabel, sementara sikap etis dan integritas yang tinggi dari pegawai memastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan tanggung jawab penuh.

2.1.3.3 Indikator-Indikator Kompetensi Pegawai

Ukuran untuk menentukan sejauh mana kompetensi pegawai dapat menjadi penentu kinerja dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun indikator kompetensi pegawai sebagai berikut (Hullah dalam Sapartiningsih & Suhano, 2018: 103).

1) Latar Belakang Pendidikan

Melibatkan analisis tingkat pendidikan dan kualitas institusi pendidikan yang diikuti oleh individu;

2) Partisipasi dalam Pelatihan

Menyelidiki sejauh mana individu terlibat dalam program pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka;

3) Keterampilan yang Dinyatakan dalam Tugas

Menilai bagaimana individu menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

4) Deskripsi Jabatan

Mengacu pada sejauh mana individu memenuhi persyaratan dan tugas yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan atau jabatannya.

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi pegawai sebagai berikut (Marwansyah dalam Njonjie, dkk, 2019: 80 dan Umar, *et al*, 2019).

1) *Intent* (Niat)

Kompetensi dimulai dengan kesadaran dan niat yang kuat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam suatu bidang. Niat ini mencerminkan motivasi individu untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya;

2) *Action* (Tindakan)

Kompetensi juga melibatkan implementasi tindakan konkret untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Langkah-langkah nyata ini mencakup partisipasi dalam pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang pekerjaan atau tanggung jawab tertentu;

3) *Outcome* (Hasil)

Hasil kompetensi tercermin dalam kemampuan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini mencakup kinerja yang efektif dalam tugas atau tanggung jawab yang diemban, kontribusi positif terhadap tujuan organisasi, dan peningkatan kualitas hasil kerja secara keseluruhan.

Indikator selanjutnya yang mengukur kompetensi pegawai menyebutkan *Each competency reflects a unique combination of knowledge, skills, abilities, and other factors that are driven and influenced by multiple traits and motivations, ultimately manifesting themselves in skillful behavior.* Hal ini menjelaskan

indikator kompetensi itu adalah kombinasi unik dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan faktor-faktor lain yang didorong dan dipengaruhi oleh berbagai sifat dan motivasi, yang akhirnya terwujud dalam perilaku terampil (Bruce Griffiths, 2015:4).

Spencer & Spencer (1993: 9-11) memberi gambaran karakteristik kompetensi sebagai berikut: 1). *Motive, The things a person consistently thinks about or wants that cause action*; 2). *Traits, Physical characteristics and consistent responses to situations or information*; 3). *Self-Concept, A person's attitude, value, or self-image*; 4). *Knowledge, Information a person has in specific content area*; 5). *Skill, The ability to perform a certain physical or mental task*. Kompetensi menurut Spencer itu terdiri atas: Motif yaitu pikiran yang menjadi tindakan, Sifat yaitu karakteristik fisik yang konsisten terhadap situasi atau informasi; Konsep diri yaitu sikap, nilai, atau citra diri; Pengetahuan yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang konten tertentu dan Keterampilan yaitu kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini untuk mengukur kompetensi pegawai menggunakan teori Spencer & Spencer yaitu: 1) Motif, 2) Sifat, 3) Pengetahuan, 4) Keterampilan, 5) Kemampuan. Hal ini karena untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dari dasar pendidikan hingga implementasi dalam tugas sehari-hari.

2.1.4 Kinerja Pengelolaan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan menggambarkan tentang tata kelola keuangan yang baik, selain itu menjadi pondasi utama untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu entitas, baik itu pemerintah daerah maupun organisasi pada umumnya. Kinerja keuangan mencerminkan gambaran tentang pencapaian keberhasilan suatu perusahaan dan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil yang diperoleh dari berbagai inisiatif yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Analisis kinerja keuangan adalah suatu tinjauan menyeluruh yang bertujuan untuk memahami sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2019: 2).

Kinerja keuangan secara substansial mencakup pencapaian dan hasil yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Ini menjadi metrik penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengevaluasi tingkat keberhasilan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto, 2013: 189). Sedangkan kinerja pengelolaan keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan (Karlina dan Sitti, 2021: 27). Kinerja keuangan (KK) adalah capaian atas implementasi anggaran belanja yang dilaksanakan oleh satuan kerja (Warsito dkk, 2019: 217). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Bihamding, 2019: 59). Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja tata kelola keuangan desa dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam satu periode anggaran.

2.1.4.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan menurut Khairil Mahpuz (2021) adalah proses dari serangkaian tahapan, diantaranya:

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk.

3) Penatausahaan

Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran meliputi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sectoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sejalan dengan tahapan di atas, Bihamding (2019: 66-68) menjelaskan tahapan siklus rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan 1) perencanaan, mengestimasi pendapatan dan belanja desa; 2) pelaksanaan yaitu implementasi anggaran; 3) penatausahaan yaitu pencatatan setiap transaksi keuangan; 4) pelaporan hasil kegiatan dan 5) pertanggung jawaban dengan penyampaian laporan oleh kepala desa.

2.1.4.3 Pengelola Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan, “Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku

PPKD". Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur kewenangan dan tugas kepala desa maupun perangkat desa selaku PPKD, yaitu:

- 1) Kepala Desa selaku PPKD, mempunyai kewenangan:
 - (1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - (2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - (3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - (4) Menetapkan PPKD;
 - (5) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - (6) Menyetujui RAK Desa; dan
 - (7) Menyetujui SPP.
- 2) Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD, mempunyai tugas:
 - (1) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - (2) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - (3) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - (4) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - (5) Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

- (6) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 3) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, mempunyai tugas:
 - (1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - (2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - (3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - (4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - (5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - (6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - 4) Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
 - (1) Menyusun RAK Desa; dan
 - (2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.1.4.4 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Azas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Azas pengelolaan keuangan desa, terdiri dari azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Yusran,

2019:19). Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Azas pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan realisasi anggaran. Azas – azas tersebut antara lain (Bihamding, 2019: 64).

- 1) Transparan, azas ini menjamin hak semua pihak mengetahui proses dalam tahapan dan akses terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabel, azas ini mengharuskan setiap tindakan, kegiatan dan kinerja pemerintah dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Partisipatif, azas ini menjamin agar masyarakat ikut terlibat langsung atau tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang menyampaikan aspirasi.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran, azas ini mengharuskan anggaran harus dilaksanakan secara konsisten antara pencatatan dan penggunaannya.

2.1.4.5 Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien serta akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah maka perlu diketahui indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, mekanisme penentuan indikator kinerja tersebut memerlukan hal hal sebagai berikut (Purwanti, 2023: 170).

- 1) Sistem Perencanaan dan Pengendalian, Sistem perencanaan dan pengendalian merujuk pada proses merencanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi. Ini mencakup penyusunan tujuan, perencanaan tindakan, alokasi sumber daya, dan pemantauan pelaksanaan. Melalui sistem ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan strategi dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan;
- 2) Spesifikasi Teknik dan Standarisasi, Spesifikasi teknik dan standarisasi berkaitan dengan penetapan norma atau standar untuk produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Hal ini memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi kualitas yang diinginkan, memberikan kepuasan kepada konsumen, dan memfasilitasi efisiensi dalam proses produksi;
- 3) Kompetensi Teknis dan Profesionalisme, Kompetensi teknis dan profesionalisme mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam melaksanakan tugas mereka. Karyawan yang kompeten secara teknis dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Profesionalisme mencakup sikap, etika kerja, dan perilaku yang mendukung citra positif organisasi;
- 4) Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar, mekanisme ekonomi melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi dan pendapatan. Mekanisme pasar mencakup interaksi organisasi dengan pasar eksternal, termasuk persaingan, permintaan konsumen, dan faktor-faktor pasar lainnya; dan

- 5) Mekanisme Sumber Daya Manusia, mekanisme sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan tenaga kerja dan aspek-aspek terkaitnya, seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Mekanisme ini memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang terampil, berkomitmen, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran, pencapaian keluaran, efisiensi anggaran, dan pencapaian indikator kinerja utama (Suluh dalam Warsito dkk, 2019; 217). Selain itu, terdapat indikator yang dapat mengukur tingkat kinerja pengelolaan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:167).

- 1) Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah dan dinyatakan dalam satuan moneter juga terkait dengan sejauh mana organisasi publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif;
- 2) Efisiensi, yaitu perbandingan output dengan input yang dikaitkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan; dan
- 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Mardiasmo, 2018:167). Hal ini karena indikator ekonomi membantu mengidentifikasi upaya pengelolaan sumber daya keuangan secara efisien. Efisiensi memberikan perbandingan antara output dan input,

sementara efektivitas menilai tingkat pencapaian hasil program. Kombinasi ketiga indikator ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja pengelolaan keuangan dan mendukung evaluasi kebijakan serta rekomendasi perbaikan.

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya memberikan dasar untuk pemahaman konsep dan tren yang berkaitan dengan topik ini. Analisis literatur tersebut tidak hanya memberikan konteks yang mendalam, tetapi juga menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menggali lebih dalam dan memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Nama (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemda di Makasar	Karlina Sitti (2021)	Variabel penelitian peneraparan GGG, Pengendalian Intrnal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Penerapan good governance dan pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar.	Equilibrium Vol. 2 (2021) 25-31
2	<i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Internal, dan	Warsito Kawedar 1) Sodikin2)	Variabel penelitian peneraparan GGG, Pengendalian Internal	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan lingkungan pengendalian, kegiatan	Matrik Vol.13 (2019) 214-222

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik	RR Sri Handayani ³⁾ Agus Purwanto ⁴⁾ Sodikin (2019)	dan Kinerja Pengelolaan Keuangan		pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, good governance dan penilaian risiko tidak terbukti berpengaruh pada kinerja keuangan	
3	Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal	Yuli Budiati, Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Asih Niati (2019)	Variabel penelitian peneraparan GGG, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan p-e-ISSN 2548 – 5024
4	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja	Wibowo Rino Pandhu (2018)	Variabel penelitian peneraparan GGG, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	(1) Penerapan <i>Good Governance</i> Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Banjararum, Dan	http://repository.usd.ac.id/id/eprint/31278

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Banjararum				(2) Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Banjararum	
5	Pengaruh Kompetensi Pengelolan Keuangan Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	Rafar Mellisa Tari, Fahlevi Heru, Basri Hasan (2015)	Variabel penelitian kompetensi pengelola keuangan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Penggunaan variabel akuntabilitas, Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Akuntabilitas, Baik Secara Simultan maupun Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 64-71
6	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di	Maimunah Munawaroh (2022)	Variabel penelitian penerapan GGG, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil Penelitian Menunjukkan Penerapan Good Governance Berpengaruh Signifikan Secara Parsial Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jember, System Pengendalian Internal Pemerintah Tidak Berpengaruh Signifikan Secara	http://digilib.uinkhas.ac.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kabupaten Jember				Parsial Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jember Dan Penerapan Good Governance Dan System Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Signifikan Secara Simultan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Jember.	
7	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara	Novita Riyati Sukma (2021)	Variabel penelitian peneraparan GGG, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil pengujian secara parsial atau individu menunjukkan bahwa good governance dan pengendalian internal masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan.	http://repository.uinsu.ac.id
8	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good	Christa Yunnita Garung & Linda Lomi Ga (2020)	Penggunaan variabel Pengelolaan Dana Desa	Penggunaan variabel akuntabilitas, transparansi, Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Disimpulkan Bahwa Akuntabilitas Dan Transparansi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan, Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Akuntabilitas Dan Transparansi	Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol. 8, No.1, Hal.19-27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Governance</i> Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka				Secara Simultan Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.	
9	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Good Government Governance sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)	Hasanah Tisna Amijaya	Variabel penelitian peneraparan GGG dan Pengendalian Internal	Penggunaan variabel akuntabilitas laporan keuangan, Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan good government governance sebagai intervening secarasimultan dan parsial.	Jurnal <i>Computech Bisnis</i> , Vol. 13 No. 2, Desember 2019, 70-80. ISSN (print): 1978-9629, ISSN (online): 2442-4943.
10	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal	Arif Widyatama & Lola Novita	Variabel kompetensi Pengendalian Internal dan Kinerja	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan variable Kompetensi	Berkala <i>Akuntansi dan Keuangan Indonesia</i> , Vol. 02,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Diarespati	Pengelolaan Keuangan		Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, sedangkan variable Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.	No. 02 (2017): 1-20
11	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Sri Rahayu Maulana, Lilis Saidah Napisah	Variabel kompetensi Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (2) Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (3) Secara Simultan Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 15 Nomor 1, Februari 2021 Hal 427-443 ISSN 2088-5088 E-ISSN 2722-4104
12	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja,	Helmi Tahir	Variabel kompetensi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian dan teknik analisis data	Disimpulkan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja	https://core.ac.uk/download/pdf/322774644.pdf

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasa n Badan Permusya waratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaa n Keuangan Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal				pengelolaan keuangan desa, motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	
13	Pengaruh Kompetens i Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaa n Keuangan Desa di Kabupaten Kerinci	Ade Nurma Jaya Putra	Variabel kompetensi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kompetensi Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Terhadap Kinerja Kepala Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kerinci	https://lppmstianusa.com/ejurnal 1
14	Pengaruh Kompetens i Aparatur Pemerintah Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Pengelolaa n Keuangan Desa	Herliani	Variabel kompetensi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan 1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.. 4. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa.	http://repository.umsu.ac.id .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sebagai Variabel Intervening				6. Pengelolaan Keuangan Desa Dapat Memediasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. 7. Pengelolaan Keuangan Desa Dapat Memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa..	
15	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Slahung	Riska Mardiana Hidayatussolehah	Variabel kompetensi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Variabel penelitian transparansi, akuntabilitas, partisipasi Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini berarti terdapat kesesuaian dari masing-masing variabel yang berhasil mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel independen kompetensi aparatur desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mampu mempengaruhi kinerja pengelolaan dan	http://eprints.umpo.ac.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.	
16	<i>Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia</i>	Sumaryati, Anna Praptika Novitasari, Eka Machmud, Zaky	Variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pegawai dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The results of hypothesis testing indicate that HR competency has an effect on the quality of FS; however, the application of AIS and internal control system has no effect on the quality of FS. The implication of this research underlines the importance of HR competency to improve the quality of local government FS.</i>	<i>The Journal of Asian Finance, Economics and Business Volume 7 Issue 10 / Pages.795-802</i>
17	<i>The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia</i>	Cecilia Lelly Kewo	Variabel sistem pengendalian internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Variabel kinerja manajerial, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The conclusion is implementation of internal control influence on financial accountability. Managerial performance influence on financial accountability in local government in Indonesia.</i>	<i>International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(1), 293-297.</i>
18	<i>Effect of Competence of Human Resources and Application of Village</i>	Rahman Pura	Variabel kompetensi pegawai dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The result showed that the competence of human resources had an insignificant effect on the performance of village financial</i>	<i>Qualitative and Quantitative Research 2019 eISSN No: 2462-2117.</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Based Financial System on Performance of Village Financial Management</i>				<i>management, while the application of the village financial system had a significant effect on the performance of village financial management.</i>	
19	<i>The Effect of Competence, Commitment, and Regulation on The Accountability of Village Financial Management with Moderated Spirituality</i>	Wana Mariska, Ratna Ayu Damayanti and Yohanis Rura	Variabel kompetensi pegawai dan Kinerja Pengelolaan Keuangan	Variabel Komitmen, regulasi, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The results of this study showed that (1) competence has a positive effect on the accountability of village financial management, (2) commitment has a positive effect on the accountability of village financial management, (3) regulation has a positive effect on the accountability of village financial management, (4) spirituality can strengthen the effect of competence on accountability of village financial management, dan (5) spirituality can strengthen the effect of commitment on accountability of village financial management.</i>	<i>International Journal of Advanced Research (IJAR) ISSN: 2320-5407</i>
20	<i>The Effect Of Internal Control System And Village Apparatus Competence On</i>	Zaenal Afifi. Mulyanto Dennyca Hendriyanto Nugroho	Variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pegawai	Variabel kinerja akuntabilitas, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The results of the analysis show that the test of the influence of the internal control system on the accountability of village fund management</i>	<i>(IJEBAR) 2021 E-ISSN: 2614-1280</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Village Fund Management Accountability</i>				<i>shows positive direction.</i>	
21	<i>The Influence of Internal Control System and Accountability of Village Fund Allocation Management on Village Financial Performance</i>	Seger Priantono, Elok Dwi Vidiyastutik	Variabel sistem pengendalian internal, kompetensi pegawai	Variabel kinerja akuntabilitas, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	<i>The results showed that the internal control and accountability system simultaneously had a significant effect on the financial performance of the village and the internal controlsystem and partial accountability also had a significant effect on the financial performance of the village in the Gending Subdistrict of Probolinggo Regency. Internal control is required to provide and present financial statements in accordance with the laws and regulations on a regular basis, the prevailing regularity will provide effectiveness to financial performance as a mirror of the success that has been done by employees</i>	<i>International Journal of Social Science and Business</i> 2022 E-ISSN: 2549-6409
22	Pengaruh Kompetensi, Sistem	Sweeteni a, Amanda	Variabel Kompetensi, sistem	Variabel kualitas penyajian	Kompetensi tidak mempengaruhi	Jurnal Analisis Bisnis

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.	Mutiara, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, dan Anissa Hakim Purwanti ni	pengendalian internal	laporan keuangan, akuntabilitas PEMDA, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Ekonomi: 44–56. 2019
23	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)	Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan	Variabel Kompetensi, sistem pengendalian internal	Variabel transparansi, komitmen organisasi, akuntabilitas PEMDA, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa	<i>Journal of Economic, Business and Engineering</i> 1 (1): 49–59. 2019
24	Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Yuli Budiati Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyant	Variabel GCG, Sistem pengendalian internal dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal	o Asih Niati			berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pengendalian internal gagal menjadi variabel moderasi pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa	p-ISSN 2548 - 298X
25	Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Mohammad Akbar Hakiki Syarif Hidayat	Variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi	Variabel akuntabilitas, Subjek Penelitian, sampel dan teknik analisis data	Hasil studi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa, kompetensi mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa, dan akuntabilitas belum mempengaruhi alokasi dana desa	Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622 -5379

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan antar variabel: sistem pengendalian internal, *good government governance* dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang undang dan aturan yang berlaku (karlina

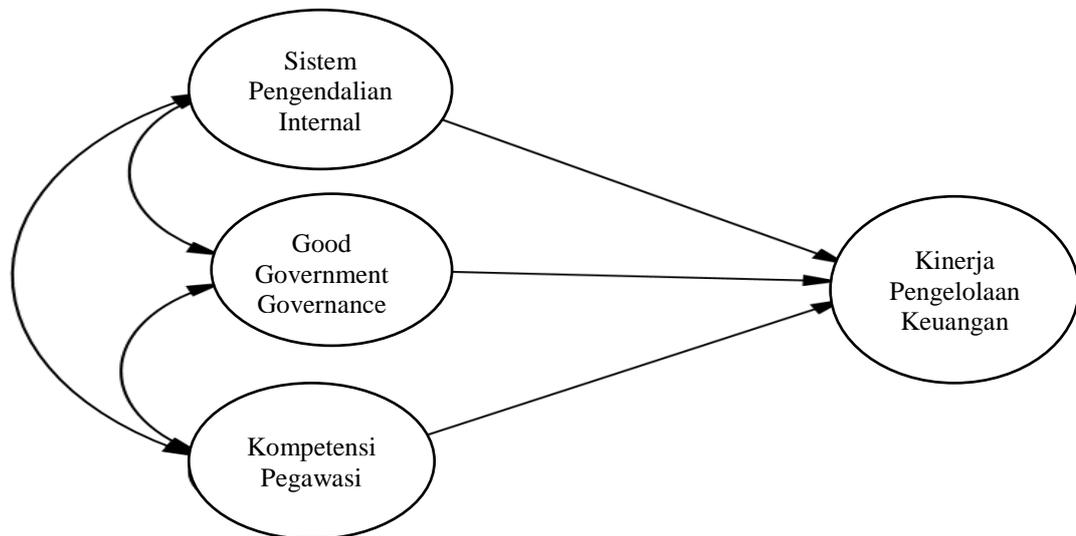
dan sitti: 2021:27). Jadi untuk meningkatkan keterampilan para pegawai pemerintah desa harus berusaha mewujudkan berbagai bentuk nyata seperti pegawai harus mampu dalam sistem pengendalian internal serta didukung dengan indikator: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas pengendalian; informasi dan komunikasi dan pemantauan. Hal demikian sejalan dengan penelitian Karlina, Sitti (2021); Warsito Kaweda (2019); dan Wibowo Rindopandhu (2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi berbagai perubahan dari *good government governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pemerintah, serta untuk mendukung terciptanya *good government governance* yang baik terhadap kinerja pengelolaan keuangan, serta didukung dengan indikator - indikatornya menurut OECD dalam Kusmayadi (2015; 33-42) yaitu: akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian. Pemerintah Desa dengan adanya *good government governance* dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Yuli (2019) dan Wibowo (2018) yang hasilnya adalah *good government governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Selanjutnya untuk menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan pada desa berkembang yaitu dengan cara pendekatan kompetensi pegawai.

Sumber daya manusia merupakan modal besar untuk pembangunan dan selektif lebih penting bagi Desa, kompetensi pegawai khususnya dalam bidang keuangan merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan yang

diperlukan oleh individu yang terlibat langsung dengan keuangan suatu organisasi. Hal ini juga mencakup sejumlah aspek yang meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelola yang kompeten ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan akuntansi sering mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan fauzan (2020:9). Adapun indikator yang mendukung pada penelitian ini adalah motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2021) ade nurma (2020) dan wana (2020) yang hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma kerangka pemikiran sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai terhadap kinerja pengelolaan keuangan (survei pada desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya) pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan - dugaan sementara yang perlu diverifikasi dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya.
2. Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, implementasi *good government governance* dan kompetensi pegawai secara simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Desa berkembang se-Kabupaten Tasikmalaya.